

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Tingkat kesejahteraan manusia Indonesia masih di bawah peringkat Indeks Pembangunan Manusia (IPM). Sebab, indikator IPM terutama mengenai konsep kemampuan manusia yang mendasar, disarankan bahwa ada ketidakpastian mengenai kapasitas individu di Indonesia untuk memenuhi persyaratan esensial. Dengan kata lain, masyarakat Indonesia belum terbebas dari kemiskinan karena tingkat hidup mereka masih rendah. (Edi Suharto, 2014). Dengan jumlah penduduk hampir 237 juta jiwa, merupakan fakta yang tak terbantahkan bahwa terlalu banyak orang Indonesia yang hidup dalam kemiskinan di negara ini. (Bahjatulloh, 2016).

Semua pemerintah di seluruh dunia dihadapkan pada masalah kemiskinan yang menantang. Kurangnya kesejahteraan adalah kemiskinan. Menurut pengetahuan konvensional, memiliki harta benda adalah indikator utama kesejahteraan, dan orang-orang yang berada di bawah ambang batas minimal kategori kesejahteraan karena kurangnya pendapatan atau konsumsi dianggap miskin. Kemiskinan juga dapat dikaitkan dengan pola pengeluaran tertentu. Suatu masyarakat dapat dianggap miskin jika anggotanya, misalnya, kekurangan makanan, perumahan, atau kebutuhan lainnya. (Jonathan, 2012). Kemiskinan, masalah sosial yang meresap, terus bertahan dalam struktur masyarakat, terutama lazim di negara-negara berkembang karena berbagai faktor sosial-ekonomi dan ketidaksetaraan sistemik yang menghambat

distribusi sumber daya dan peluang yang merata, sehingga melanggengkan siklus kekurangan dan marginalisasi. (Suharto, 2015)

Menurut data yang diberikan Badan Pusat Statistik (BPS) Kab. Ponorogo 2021, jumlah individu yang hidup di bawah garis kemiskinan/GK di Kabupaten Ponorogo adalah 89,94 ribu pada Maret 2021. Ini menandai peningkatan 3,21 ribu individu dari angka yang tercatat pada Maret 2020. Akibatnya, proporsi penduduk miskin di Kabupaten Ponorogo naik dari 9,95% pada Maret 2020 menjadi 10,26% pada Maret 2021.

Inisiasi Program Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) oleh pemerintah Indonesia pada tahun 2017 bertujuan untuk mempercepat upaya pengurangan kemiskinan dan merumuskan kebijakan perlindungan sosial. Disebut sebagai Program Bantuan Pangan Non Tunai di negara lain, BPNT memprioritaskan pembentukan sistem perlindungan sosial (memastikan kecukupan pangan) bagi orang miskin, daripada sekadar perpanjangan dari program subsidi tunai yang dirancang untuk membantu rumah tangga berpenghasilan rendah dalam mengatasi fluktuasi harga bahan bakar. Tujuannya adalah agar implementasi BPNT di Indonesia bermanfaat bagi masyarakat yang paling miskin dan rentan, berpotensi mempercepat pencapaian Tujuan Pembangunan Milenium jika dipertahankan setidaknya hingga tahun 2020. Pemerintah pusat menawarkan program Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) untuk memungkinkan penerima mendapatkan makanan untuk kebutuhan rumah tangga mereka.

Program Beras untuk Keluarga Miskin (RASKIN) adalah program pemerintah yang dirancang untuk meningkatkan ketahanan pangan dan

mendukung keluarga miskin. Ini memasok 15 kilogram beras per keluarga setiap bulan, dengan harga Rp 1.600 per kilogram di pusat-pusat distribusi tertentu, atau menyediakan beras bersubsidi kepada penerima yang memenuhi syarat. Program Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) merupakan inisiatif pemerintah lainnya dengan tujuan meringankan beban keuangan pada individu dalam memenuhi kebutuhan dasar mereka. Program ini menawarkan bantuan pangan non-moneter kepada Keluarga Penerima Manfaat (KPM) sebesar Rp 110.000 per KPM setiap bulan, difasilitasi melalui sistem elektronik yang dikenal sebagai kartu keluarga sejahtera (KKS). KKS secara eksklusif digunakan untuk akuisisi barang-barang penting.

Inisiasi program khusus ini sejalan dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia No. 63 Tahun 2017 tentang Distribusi Bantuan Non-Moneter, menunjukkan kepatuhan yang ketat terhadap arahan pemerintah. Peluncuran Program Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) dimulai pada tahun 2017 di 44 daerah perkotaan yang dilengkapi dengan infrastruktur dan dukungan logistik yang diperlukan. Tujuan utama dari upaya ini adalah untuk memasok Keluarga Penerima Manfaat (KPM) yang ditunjuk dengan makanan bergizi dan sehat secara tepat waktu dan tepat, dengan penekanan khusus pada peningkatan kesejahteraan mereka secara keseluruhan.

Temuan awal Penelitian menunjukkan bahwa pengenalan program Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) di Desa Baosan Lor Kecamatan Ngrayun Kabupaten Ponorogo telah membuahkan hasil yang menguntungkan. Hal ini dapat dikaitkan dengan peran penting program dalam mengurangi ketegangan

ekonomi yang dialami oleh keluarga penerima. Ada beberapa tanda yang menunjukkan bahwa prosedur BPNT saat ini menawarkan kenyamanan yang lebih besar dan memberdayakan KPM dengan lebih banyak pilihan dan otoritas, yang mengarah pada keuntungan. Namun demikian, inisiatif BPNT di Desa Baosan Lor Kecamatan Ngrayun Kabupaten Ponorogo gagal mencapai tujuan yang dimaksudkan, mengakibatkan beberapa keluarga yang ditunjuk untuk menerima bantuan tidak terdaftar.

Berdasarkan paparan diatas, peneliti tertarik untuk melakukan penelitian tambahan mengenai “Implementasi Program Bantuan Sosial dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat Desa BaosanLor Kecamatan Ngrayun Kabupaten Ponorogo”.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang maka rumusan masalah penelitian adalah:

1. Bagaimana implementasi Program Bantuan Sosial dalam meningkatkan Kesejahteraan masyarakat Desa Baosan Lor Kecamatan Ngrayun Kabupaten Ponorogo?
2. Bagaimana faktor dan kendala implementasi program bantuan sosial di Desa Baosan Lor Kecamatan Ngrayun Ponorogo?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui bagaimana implementasi Program Bantuan Sosial dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
2. Untuk mengetahui bagaimana faktor dan kendala implementasi program bantuan sosial.

D. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diantisipasi untuk menghasilkan keuntungan baik dalam aspek teoritis maupun praktis.

- a) Diharapkan bahwa hasil penelitian ini akan membantu memperluas pengetahuan tentang pelaksanaan program bantuan pangan non-tunai (BPNT) di Desa Baosan Lor..
- b) Manfaat praktis yang diantisipasi dari penelitian ini diprediksi memiliki dampak positif pada pembaca dan menghasilkan hasil yang menguntungkan bagi penulis. Selain itu, diproyeksikan memberikan keuntungan, yang memberikan wawasan berharga untuk meningkatkan pelaksanaan program bantuan pangan non tunai (BPNT) di Desa Baosan Lor.

E. Landasan Teori

1. Kebijakan Publik

Studi kebijakan publik mencakup beragam disiplin ilmu dan industri, yang mencakup ekonomi, politik, sosial, budaya, hukum, dan banyak domain lainnya dalam lanskap pemerintahan. Bidang kebijakan publik menunjukkan beragam skala, mulai dari tingkat nasional menyeluruh hingga tingkat regional atau bahkan komunitas yang lebih lokal. Ini termasuk spektrum mekanisme seperti undangan resmi, undang-undang pemerintah, arahan presiden, pedoman menteri, peraturan yang ditetapkan oleh otoritas regional atau provinsi, dekrit yang dikeluarkan oleh gubernur, aturan yang ditetapkan di tingkat kabupaten atau kota, serta keputusan yang diberlakukan oleh keputusan bupati/walikota.

Dalam hal terminologi, definisi kebijakan publik beragam, tergantung pada perspektif dari mana ia didekati. Easton mencirikan kebijakan publik sebagai distribusi otoritatif nilai-nilai masyarakat atau distribusi nilai-nilai wajib di antara semua anggota masyarakat. Demikian pula, Laswell dan Kaplan menggambarkan kebijakan publik sebagai program terencana yang terdiri dari tujuan, nilai, dan praktik, atau program yang bertujuan untuk mencapai tujuan melalui praktik yang bertujuan.

Menurut Thomas R. Dye, Studi kebijakan publik adalah penyelidikan akademis ke dalam proses rumit menggambarkan, menganalisis, dan memberikan penjelasan untuk sebab-sebab-segi dan dampak dari tindakan pemerintah. Pemeriksaan menyeluruh terhadap efek yang diharapkan (direncanakan) dan tidak diharapkan dari kebijakan politik terhadap masyarakat ditemukan dalam studi kebijakan publik, yang juga mencakup penggambaran upaya kebijakan publik, mengevaluasi pengaruh kekuatan lingkungan terhadap isi kebijakan publik, dan menganalisis dampak pernyataan kelembagaan dan proses politik terhadap kebijakan publik.

Ada berbagai definisi kebijakan publik, tergantung pada interpretasinya. Easton mencirikan kebijakan publik sebagai distribusi nilai oleh mereka yang berkuasa kepada seluruh masyarakat atau distribusi nilai wajib kepada semua individu dalam masyarakat. Laswell dan Kaplan juga menggambarkan kebijakan publik sebagai skema terstruktur yang bertujuan untuk mencapai tujuan, nilai, dan perilaku, atau mewujudkan tujuan dan nilai melalui tindakan yang disengaja.

Menurut Suandi (2010), Irfan Islamy telah menyatakan pentingnya membedakan kebijaksanaan dari kebijakan. Kebijaksanaan sama dengan kebijakan,

yang menandakan kehati-hatian. Sementara kebijakan mencakup aturan yang ditetapkan, kebijaksanaan memerlukan evaluasi lebih lanjut. Menurut James E Anderson, kebijakan didefinisikan sebagai “tindakan yang bertujuan yang dilakukan oleh individu atau sekelompok individu dalam menangani masalah atau masalah tertentu” (Islamy, 2009). Ini melibatkan serangkaian tindakan yang disengaja dengan tujuan tertentu yang dieksekusi oleh individu atau kelompok untuk menyelesaikan masalah tertentu. Menurut Budi Winarno (2007:18), proposal kebijakan yang diajukan oleh Anderson dianggap lebih cocok karena berpusat pada tindakan nyata daripada gagasan atau tujuan hipotetis. Perbedaan ini juga menyoroti perbedaan antara kebijakan dan pengambilan keputusan, yang melibatkan pemilihan di antara berbagai opsi yang mungkin.

Menurut Richard Rose, yang disebutkan oleh Budi Winarno (2007: 17), policy harus dianggap sebagai kumpulan aktivitas yang berhubungan satu sama lain dan memiliki konsekuensi bagi mereka yang terlibat, daripada hanya membuat keputusan. Menurut pendapat kedua ahli, ini menunjukkan bahwa mengganti kata "policy" dengan "decision" adalah salah karena pada dasarnya policy dianggap sebagai suatu arah atau pola aktivitas daripada hanya membuat keputusan.

Menurut perspektif para ahli yang disebutkan sebelumnya, dapat disimpulkan bahwa kebijakan adalah tindakan atau perilaku yang dijalankan atau tidak dilakukan oleh individu, entitas kolektif, atau badan pengatur untuk mencapai tujuan tertentu.. Pengambilan keputusan merupakan salah satu bagian dari pengambilan keputusan, yang terdiri dari upaya untuk memilih di antara berbagai alternatif guna mencapai tujuan tertentu.

Kebijakan berfungsi sebagai strategi yang digunakan untuk mencapai tujuan kebijakan, tanpa signifikansi tambahan atau berkurang. Ada dua pendekatan yang

layak untuk melaksanakan kebijakan publik: pemberlakuan langsung melalui program atau pengembangan kebijakan tidak langsung yang berasal dari kebijakan publik asli. Kemajuan dalam pelaksanaan kebijakan mudah diidentifikasi, dimulai dengan program, maju ke proyek, dan berpuncak pada kegiatan. Kerangka kerja ini meniru protokol yang mapan dalam tata kelola, terutama dalam domain publik. Kebijakan diubah menjadi program, yang kemudian diterjemahkan ke dalam proyek, yang akhirnya terwujud dalam kegiatan yang diawasi oleh entitas pemerintah, komunitas, dan kolaborasi pemerintah dengan masyarakat.

2. Teori Implementasi

Abdul Wahab (2008) berpendapat bahwa dalam ranah implementasi kebijakan, prosesnya lebih dari sekadar penerjemahan mandat politik ke dalam prosedur operasi standar melalui jalur birokrasi. Proses ini mencakup interaksi kompleks antara konflik, proses pengambilan keputusan, dan distribusi sumber daya yang dihasilkan dari kebijakan tersebut.

Van Meter dan Van Horn, dikutip dalam Winarno (2002, hlm. 102), memberikan definisi implementasi kebijakan sebagai tindakan yang dilakukan oleh individu publik dan swasta (serta kelompok) yang ditujukan untuk mencapai tujuan dan sasaran yang ditetapkan dalam keputusan kebijakan sebelumnya.

Parson (2005, hlm. 101-107) menguraikan berbagai model implementasi kebijakan, menawarkan ikhtisar singkat dari setiap model. Ini termasuk Implementasi sebagai administrasi sempurna, Implementasi sebagai Manajemen Kebijakan, Implementasi sebagai evolusi, Implementasi sebagai pembelajaran, Implementasi sebagai struktur, Implementasi sebagai hasil, Implementasi sebagai perspektif, Implementasi sebagai pemetaan mundur, Implementasi sebagai simbolisme, dan Implementasi sebagai ambiguitas. Lebih jauh, ada diskusi

tentang Implementasi sebagai koalisi. Selain itu, Brian W. Hogwood dan Lewis A. Gunn telah mengusulkan model implementasi tambahan di luar yang disebutkan di atas.

Implementasi mengacu pada langkah-langkah yang diambil oleh otoritas pemerintah untuk mencapai tujuan yang diuraikan dalam arahan kebijakan. Sebelum merumuskan kebijakan, pemerintah harus menilai potensi dampak buruk yang mungkin ditimbulkan kebijakan tersebut terhadap tatanan masyarakat. Tujuan utama suatu kebijakan adalah untuk memastikan koeksistensi yang harmonis dengan masyarakat, tanpa dampak yang merugikan.

Lebih jauh, sebagaimana diuraikan oleh Jenkins dalam Parsons (2006:463), studi implementasi berkisar pada pemeriksaan perubahan. Fokusnya terletak pada pemahaman mekanisme perubahan, strategi untuk memfasilitasi perubahan, dan analisis dinamika rumit dalam lingkup politik. Ini termasuk menyelidiki bagaimana entitas eksternal dan internal dalam kerangka politik mengelola operasi mereka, terlibat satu sama lain, pendorong yang mendasari tindakan mereka, serta faktor-faktor yang memengaruhi variasi dalam perilaku mereka. Dalam hal yang sama, Pressman dan Wildavsky dalam Parsons (2006:468) berpendapat bahwa implementasi memerlukan memastikan kepatuhan terhadap arahan dan mengawasi perkembangan tahapan dalam sistem tertentu. Inti dari implementasi adalah pengembangan kerangka regulasi yang mengurangi konflik dan penyimpangan dari tujuan yang ditetapkan oleh kerangka kebijakan. Berdasarkan perspektif, teori ini menggarisbawahi pentingnya menganalisis pelaksanaan inisiatif pemerintah yang terdesentralisasi. Teori ini mengidentifikasi empat set variabel utama yang dapat memengaruhi efektivitas dan hasil program. Karakteristik dan kemampuan agen pelaksana

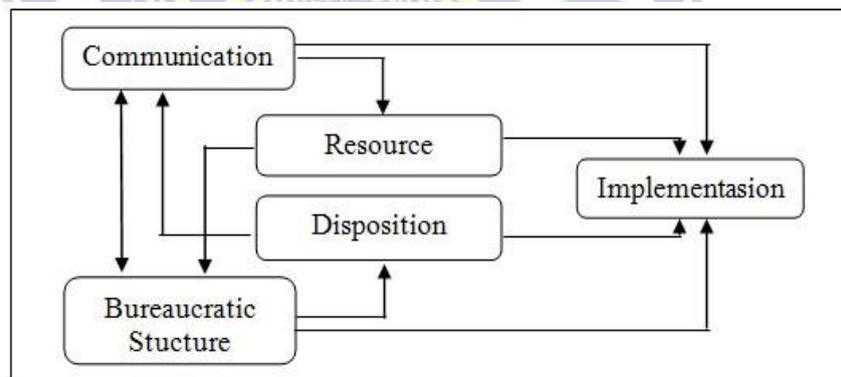
merupakan faktor signifikan yang mempengaruhi pemanfaatan sumber daya organisasi untuk pelaksanaan program, serta hubungan antara organisasi dan kondisi lingkungan.

Dalam ranah penerapan praktis, pelaksanaan kebijakan muncul sebagai prosedur yang sangat rumit, yang sering kali diresapi dengan implikasi politik yang berasal dari campur tangan berbagai kepentingan. Penafsiran alternatif disampaikan, yang menjelaskan konsep implementasi dengan mengemukakan bahwa inti dari implementasi kebijakan terletak pada pemahaman tentang tindakan selanjutnya setelah validasi atau perumusan suatu program. Pemahaman ini memerlukan upaya untuk mengelolanya secara efektif dan menghasilkan efek kepada masyarakat (Mazmanian dan Sabatier, (2010).

Sebuah model untuk menerapkan kebijakan publik., sebagaimana diusulkan lebih lanjut oleh Grindle (1980:7), menyatakan bahwa pencapaian hasil yang sukses dalam proses implementasi kebijakan bergantung pada kegiatan program yang telah dirumuskan, pendanaan yang memadai, serta pengaruh Konten Kebijakan dan Konteks Implementasi. Dari perspektif etimologis, implementasi diartikan sebagai proses pelaksanaan tugas dengan memanfaatkan sumber daya (alat) untuk menghasilkan hasil yang diinginkan. Oleh karena itu, dalam ranah kebijakan publik, istilah Proses implementasi kebijakan publik dapat dipahami sebagai operasionalisasi atau pelaksanaan kebijakan publik yang telah dirancang dan disetujui, menggunakan berbagai sumber daya dan alat untuk mencapai tujuan dan sasaran kebijakan yang dimaksudkan secara sistematis dan terorganisir.

Oleh karena itu, penerapan doktrin Edward III pada kebijakan publik sering dikaitkan dengan prosedur administratif di mana berbagai tujuan proses dan tindakan organisasi tertanam dalam metode dan strategi yang digunakan.

Para peneliti menyarankan bahwa teori George Edward III adalah kerangka teoritis yang paling cocok untuk menilai penelitian ilmiah ini. Teori ini dinilai lebih tepat untuk dijadikan acuan dalam penelitian ini karena selaras dengan keadaan Pemerintah Daerah dan warga Kabupaten Ponorogo, yang tinggal di daerah yang berdekatan dan memiliki komunitas yang relatif kecil. Teori George Edward III, sebagaimana dikutip dalam Widodo (2010), dianggap sangat relevan dalam konteks ini. mengidentifikasi empat faktor kunci yang mempengaruhi keberhasilan atau kegagalan implementasi kebijakan, yaitu komunikasi, sumber daya, disposisi, dan struktur birokrasi, sebagaimana digambarkan dalam diagram alir berikut:



Gambar 2. Faktor Penentu Keberhasilan Implementasi menurut Edward III

a. Komunikasi

Edward III dalam Widodo (2010:97) berpendapat bahwa komunikasi digambarkan sebagai tindakan mentransfer informasi dari pengirim ke penerima. Penyebaran informasi mengenai kebijakan publik, sebagaimana disebutkan oleh Edward III dalam Widodo (2010:97), sangat penting untuk menginformasikan kepada pembuat kebijakan tentang persiapan dan tindakan yang diperlukan untuk

implementasi kebijakan, sehingga memastikan tercapainya tujuan dan sasaran kebijakan yang diinginkan. Edward III dalam Widodo (2010:97) mencatat bahwa komunikasi kebijakan mencakup berbagai aspek seperti transmisi, kejelasan, dan koherensi.

- 1) Dimensi transmisi (*transmission*) mengharuskan kebijakan publik tersampaikan Informasi ini ditujukan untuk berbagai khalayak, termasuk pembuat kebijakan, kelompok sasaran kebijakan, dan pemangku kepentingan lainnya, baik melalui cara langsung maupun tidak langsung.
- 2) Dimensi kejelasan (*clarity*) Penting untuk memastikan bahwa kebijakan disampaikan secara efektif kepada mereka yang bertanggung jawab atas implementasinya, kelompok audiens tertentu, dan pihak tambahan yang terlibat, untuk mengartikulasikan dengan jelas tujuan, tujuan, tujuan, dan isi kebijakan publik. dapat dipahami, sehingga penyusunan dan pelaksanaan kebijakan dapat berjalan efektif dan efisien, sehingga tercapai keberhasilan kebijakan.
- 3) Dimensi konsistensi (*consistency*) penting untuk menjamin adanya koherensi kebijakan, sehingga tidak terjadi kerancuan antara pelaksana kebijakan, kelompok sasaran, dan pemangku kepentingan..

b. Sumberdaya

Edward III, dirujuk dalam karya Widodo (2010), berpendapat bahwa elemen sumber daya memainkan peran penting dalam membentuk pelaksanaan kebijakan. Penulis melanjutkan dengan menjelaskan bahwa sumber daya ini mencakup modal manusia, aset keuangan, harta benda, dan sumber otoritas.

- 1) Sumber daya manusia merupakan faktor krusial yang memengaruhi efektivitas implementasi kebijakan, sebagaimana menekankan pentingnya staf sebagai sumber daya esensial bagi keberhasilan pelaksanaan kebijakan. Perlu dicatat bahwa meskipun arahan implementasi jelas dan konsisten, ketiadaan sumber daya yang diperlukan untuk personel dapat menghambat efektivitas implementasi kebijakan.
- 2) Dalam temuan penelitiannya, Edward III mengemukakan bahwa kendala dalam alokasi anggaran dan penentangan dari warga negara dapat menghambat perolehan sumber daya yang memadai, sehingga memengaruhi kualitas layanan yang diberikan oleh para pelaksana. Penulis selanjutnya membahas bagaimana insentif federal yang terbatas berkontribusi signifikan terhadap kurangnya keberhasilan dalam implementasi program, dengan menekankan dampak langsung dari keterbatasan sumber daya anggaran terhadap hasil pelaksanaan kebijakan dan motivasi para pelaku kebijakan yang terlibat.
- 3) Sumber daya peralatan, sebagaimana didefinisikan oleh Edward III dalam Widodo (2010), mencakup alat yang digunakan untuk melaksanakan implementasi kebijakan, seperti bangunan, tanah, dan infrastruktur yang membantu dalam pemberian layanan selama proses implementasi. Edward III dalam Widodo (2010) juga menekankan pentingnya fasilitas fisik dalam memfasilitasi pelaksanaan kebijakan. Sekalipun seorang implementor memiliki personel yang memadai, pemahaman tugas, dan kewenangan untuk bertindak, ketiadaan infrastruktur, peralatan, material, dan lingkungan yang sesuai dapat menghambat keberhasilan implementasi.

4) Sumber Daya Otoritas Otoritas merupakan sumber daya penting lainnya yang memengaruhi efektivitas implementasi kebijakan. Sebagaimana dinyatakan oleh Edward III dalam Widodo (2010:103), memiliki kewenangan pengambilan keputusan yang memadai dalam suatu lembaga berdampak signifikan terhadap kemampuannya untuk melaksanakan kebijakan. Kewenangan ini menjadi sangat penting selama penyelesaian masalah yang mendesak, yang memerlukan keputusan yang cepat. Dengan demikian, Edward III dalam Widodo (2010:103) menekankan perlunya memberdayakan aktor kebijakan utama dengan kewenangan untuk secara independen membuat keputusan dalam yurisdiksi mereka demi keberhasilan implementasi kebijakan.

c. Disposisi

Konsep disposisi, sebagaimana didefinisikan oleh Edward III dalam karya Widodo (2010:104), berkaitan dengan "keinginan, kecenderungan, dan kecenderungan pembuat kebijakan untuk melaksanakan kebijakan dengan tekun guna mencapai tujuan kebijakan." Edward III dalam publikasi Widodo (2010:104-105) menegaskan bahwa efektivitas dan efisiensi implementasi kebijakan bergantung pada para pelaksana yang tidak hanya memiliki pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan untuk pelaksanaan kebijakan, tetapi juga menunjukkan motivasi untuk melaksanakan kebijakan. Edward III, sebagaimana dibahas dalam studi Agustinus (2006:159-160), menyoroti berbagai faktor yang berkaitan dengan disposisi dalam implementasi kebijakan.

1) Penunjukan birokrasi dapat menimbulkan tantangan yang signifikan terhadap implementasi kebijakan jika disposisi pelaksana menghambat pelaksanaan kebijakan yang diinginkan oleh otoritas yang lebih tinggi. Dengan demikian,

pemilihan personel yang bertanggung jawab atas implementasi kebijakan harus memprioritaskan individu yang berkomitmen pada kebijakan yang ditetapkan, terutama yang melayani kepentingan masyarakat.

- 2) Insentif telah diusulkan sebagai metode untuk mengatasi masalah sikap pelaksana kebijakan melalui manipulasi faktor motivasi. Mengingat bahwa individu cenderung bertindak sesuai dengan kepentingan mereka sendiri, pembuat kebijakan dapat memengaruhi perilaku pelaksana dengan menyesuaikan insentif. Memperkenalkan penghargaan atau hukuman tertentu dapat berfungsi sebagai katalisator untuk pelaksanaan arahan yang efektif, yang bertujuan untuk memajukan tujuan pribadi atau organisasi..

d. Struktur Birokrasi

Ripley dan Franklin di Winarno (2005) menguraikan enam karakteristik birokrasi berdasarkan pengamatan mereka terhadap birokrasi di Amerika Serikat. Karakteristik ini termasuk pembentukan birokrasi sebagai alat untuk mengelola urusan publik, peran penting dalam implementasi kebijakan publik dengan berbagai kepentingan di seluruh hierarki, beragam tujuannya, sifat fungsi birokrasi yang rumit dan ekspansif, ketahanan birokrasi yang menonjol, dan kecenderungan mereka untuk bertahan daripada berhenti ada. Selanjutnya, birokrasi digambarkan sebagai kekuatan yang tidak memihak dan tidak sepenuhnya tunduk pada kontrol eksternal.

Meskipun sumber daya yang cukup tersedia untuk menerapkan kebijakan dan individu memiliki pengetahuan, termotivasi, dan sadar akan apa yang perlu dilakukan, Edward III dalam Widodo (2010) berpendapat bahwa efektivitas implementasi kebijakan mungkin masih terhambat oleh inefisiensi dalam kerangka birokrasi. Kerangka kerja ini, seperti yang disorot oleh Edward III

dalam Widodo (2010), mencakup unsur-unsur seperti struktur birokrasi, alokasi kekuasaan, keterkaitan antar unit organisasi, dan sebagainya. Menurut Edwards III di Winarno (2005), birokrasi dicirikan oleh dua atribut utama: “Prosedur Operasional Standar (SOP) dan fragmentasi.” Winarno (2005) menjelaskan bahwa SOP berasal dari kebutuhan internal akan kepastian dalam hal waktu, sumber daya, dan kebutuhan akan keseragaman dalam pengaturan organisasi yang kompleks dan luas. Edward III dalam Widodo (2010) menekankan bahwa kejelasan standar operasional yang berkaitan dengan mekanisme, sistem, dan prosedur pelaksanaan kebijakan, penggambaran tugas utama, peran, dan wewenang, distribusi tanggung jawab di antara para pemangku kepentingan, dan penyelarasan hubungan antara lembaga pelaksana, semuanya secara signifikan mempengaruhi keberhasilan implementasi kebijakan.

Meskipun demikian, menurut temuan Edward III sebagaimana dikutip dalam Winarno (2005:152), Prosedur Operasional Standar (SOP) cenderung menjadi tantangan bagi pelaksanaan kebijakan baru yang memerlukan metode kerja baru atau personel yang berbeda. Akibatnya, semakin luas kebijakan menuntut perubahan dalam praktik konvensional dalam suatu lembaga, semakin tinggi kemungkinan SOP menghambat implementasinya. Seperti yang dijelaskan Edward III dalam Winarno (2005:155), "fragmentasi melibatkan pendelegasian tanggung jawab atas suatu kebijakan kepada banyak lembaga, sehingga memerlukan koordinasi." Selain itu, seperti yang diutarakan Edward III dalam Widodo (2010:106), kerangka birokrasi yang terdesentralisasi dapat menyebabkan gangguan dalam komunikasi, karena ada risiko signifikan instruksi disalahartikan. Ketika implementasi kebijakan menjadi lebih terdistorsi, tingkat koordinasi yang diperlukan semakin meningkat.”.

3. Bantuan Sosial BNPT

Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) mengacu pada bentuk bantuan pangan non-moneter yang ditawarkan oleh pemerintah kepada rumah tangga yang memenuhi syarat, yang didistribusikan setiap bulan melalui sistem elektronik yang khusus ditujukan untuk pembelian barang-barang makanan di vendor makanan/e-warong resmi, bekerja sama dengan lembaga keuangan.

a) Tujuan Program Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT)

Meningkatkan mitigasi tanggung jawab keuangan bagi Keluarga Penerima Manfaat (KPM) dengan memenuhi sebagian kebutuhan diet mereka. Meningkatkan keseimbangan gizi untuk KPM. Meningkatkan ketepatan dan ketepatan waktu penyaluran Food Aid kepada KPM. Pemberian otonomi dan wewenang KPM dalam mencapai kecukupan pola makan. Memfasilitasi kemajuan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan/SDGs.

b) Manfaat Program Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT)

Peningkatan ketahanan di tingkat KPM, selain implementasi strategi perlindungan sosial yang bertujuan untuk mengurangi kemiskinan, telah menjadi fokus penting dalam diskusi kebijakan saat ini. Ketahanan yang ditingkatkan ini berfungsi sebagai faktor penting dalam mengurangi dampak buruk dari guncangan ekonomi dan bencana alam pada populasi yang rentan. Selain itu, peningkatan efisiensi distribusi bantuan sosial memainkan peran penting dalam memastikan bahwa sumber daya dialokasikan secara efektif kepada mereka yang membutuhkan.

c) Tahap Registrasi/Distribusi KKS (Kartu Keluarga Sejahtera)

- 1) Pendaftaran atau pembukaan rekening oleh bank penyalur dilakukan secara kolektif berdasarkan data yang ditetapkan oleh Kementerian Sosial.
- 2) Bank penyalur dengan bantuan pemerintah kabupaten/kota dan pendamping sosial, menyalurkan KKS dan kelengkapannya kepada KPM yang telah membuka rekening.
- 3) KPM akan mendapatkan informasi mengenai pendaftarannya dalam

program BPNT dan proses pendaftaran KKS.

4) Calon KPM wajib menunjukkan kartu identitas diri pada saat pendaftaran KKS untuk verifikasi dokumen sebelum menerima KKS.

5) Setelah pendaftaran, bank penyalur akan menginformasikan lokasi E-Warong tempat KPM dapat melakukan pengecekan saldo KKS..

Jika terdapat perbedaan dalam data KPM, khususnya dalam hal nama, NIK, atau kesalahan yang terkait dengan alat selama proses pendaftaran, KPM harus memperbaiki data dengan memberikan dokumentasi tambahan, seperti sertifikat yang diperoleh dari desa atau kelurahan setempat..

F. Penegasan Istilah

Penegasan istilah ini menawarkan penjelasan ringkas dan transparan tentang ide yang dimaksudkan untuk diadopsi sebagai kerangka kerja dalam penelitian. Oleh karena itu, para sarjana diminta untuk menjelaskan berbagai ide yang saling berhubungan dalam penelitian ini, termasuk:

1. Implementasi

Proses menyampaikan kebijakan kepada masyarakat dalam rangka mencapai tujuan yang diinginkan umumnya disebut sebagai implementasi. Gordon, dalam karya ilmiahnya, menekankan bahwa implementasi mencakup beragam kegiatan yang semuanya ditujukan untuk keberhasilan realisasi program yang ada. Proses rumit ini melibatkan perencanaan, koordinasi, dan pelaksanaan strategi yang cermat untuk memastikan bahwa tujuan yang dimaksudkan terpenuhi secara efektif, seperti yang disorot oleh Mulyadi pada tahun 2015.

2. Program Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT)

Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) mengacu pada bentuk bantuan non-moneter berupa makanan yang diberikan pemerintah kepada rumah

tangga yang memenuhi syarat setiap bulan. Bantuan ini didistribusikan melalui sistem akun elektronik khusus untuk pembelian barang makanan di vendor makanan yang ditunjuk atau e-warong bekerja sama dengan lembaga keuangan.

3. Kesejahteraan

kesejahteraan sosial adalah Tiga komponen membentuk kondisi kesejahteraan sosial: pertama, tingkat di mana masalah sosial terkendali; kedua, tingkat di mana keinginan terpenuhi; dan ketiga, tingkat di mana kesempatan diberikan kepada individu, keluarga, komunitas, dan masyarakat secara keseluruhan. Fahrudin (2012)

4. Masyarakat Desa

Masyarakat Komunitas dan daerah pedesaan atau pemukiman kecil, adalah dua istilah yang memiliki definisi berbeda. Untuk memahami esensi dari istilah-istilah ini, penting untuk terlebih dahulu memahami konsep masyarakat. Sebagai ilustrasi, masyarakat dicirikan sebagai kolektif individu, baik dalam jumlah besar atau kecil, yang saling berhubungan dalam kelompok dan memberikan pengaruh satu sama lain. Selain itu, masyarakat dapat dianggap sebagai kohort individu yang terlibat dalam interaksi timbal balik (Koentjaraningrat, 2022).

G. Definisi Operasional

Definisi operasional dirancang untuk mengoperasionalkan penelitian agar sesuai dengan kondisi spesifik di lapangan, dengan tujuan menghasilkan hasil penelitian atau hasil. Definisi operasional merupakan komponen penting dari penelitian ini. dijelaskan sebagaiberikut :

1. Implementasi Program BPNT merupakan fokus utama dalam penelitian ini, peneliti akan memaksimalkan pemahaman dan pengumpulan data untukdi analisa dengan cermat agar sesuai dengan tujuan penelitian
 - a) Analisis potensi, dan masalah,
 - b) Pelaksanaan program bantuan
 - c) Pengendalian

proses untuk mengukur kinerja dan memastikan bahwa tindakan yang dilakukan berhasil mencapai tujuan

d) Evaluasi

proses menentukan nilai untuk suatu hal atau objek yang berdasarkan pada acuan-acuan

2. Faktor Pendukung dan Penghambat Implementasi Bantuan Pangan Non Tunai di Desa Baosan Lor.

- a) Faktor Pendukung implementasi BPNT (komunikasi, sumber daya, struktur birokrasi)
- b) Faktor penghambat implementasi BPNT (sumber daya manusia)

H. Metode Penelitian

Metode penelitian mengacu pada strategi yang digunakan oleh peneliti untuk mengumpulkan, menjelaskan, dan mengevaluasi informasi yang tersedia di lokasi penelitian melalui penerapan pengukuran berbasis pengetahuan. Tujuan utama dari metode ini adalah untuk mengungkap kebenaran yang mendasarinya.(Sugiyono, 2015). Pada hakikatnya, tujuan dari metodologi penelitian adalah untuk membantu para peneliti dalam memberikan penilaian yang akurat dan autentik terhadap suatu subjek. Metodologi penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini dikenal sebagai penelitian deskriptif, yang berfokus pada penggambaran fenomena dan peristiwa yang ada. Selanjutnya, penelitian deskriptif berfungsi sebagai metode pemecahan masalah yang memerlukan pemeriksaan dan representasi berbagai subjek dan objek studi (seperti individu, lembaga masyarakat, dll.) Dalam konteks saat ini, dengan mengandalkan fakta yang dapat diamati.(Moleong, 2021).

2. Lokasi penelitian

Penelitian ini di laksanakan di Desa Baosan Lor, Kecamatan Ngrayun, Kabupaten Ponorogo dikarenakan masih banyaknya keluarga yang menerima program bantuan Sosial Bantuan Pangan Non Tunai atau BPNT

3. Teknik Penentuan Informan

Dalam penelitian ini, para sarjana menggunakan metodologi tujuan untuk memilih peserta penelitian, secara khusus memilih mereka sesuai dengan kriteria dan tujuan tertentu yang sejalan dengan fokus penelitian. Klasifikasi peserta dalam penelitian ini dibagi menjadi dua kategori: informan primer dan informan sekunder. Informan utama bertindak sebagai sumber utama yang memiliki pemahaman yang lebih mendalam tentang fokus penelitian, sedangkan informan sekunder memberikan informasi tambahan.

Akuisisi Narator atau Informan dalam penelitian ini dicapai dengan memanfaatkan Instrumen untuk pengukuran atau pengambilan data yang ditempatkan langsung pada orang tersebut. Perangkat ini bertindak sebagai sarana utama untuk mendapatkan informasi yang diinginkan. Sumber utama data dalam studi khusus ini termasuk kepala desa, pendamping program bantuan pangan non tunai, dan penerima program bantuan pangan non tunai (BPNT) di Desa Baosan Lor, Kecamatan Ngrayun, Kabupaten Ponorogo.

Data memegang peranan penting bagi para peneliti karena ketepatan dalam memilih dan mengidentifikasi sumber data secara langsung memengaruhi kualitas dan kedalaman data serta informasi yang diperoleh. Fokus utama penelitian ini terletak pada pengumpulan dan analisis data kualitatif. Data ini bersumber dari berbagai saluran, yang mencakup beragam jenis sumber data yang

digunakan dalam penelitian ini.

Kepala Desa Baosan Lor	= 1 orang
Penanggung Jawab BPNT di Desa Baosan Lor	= 1 orang
Masyarakat penerima BPNT	= 5 orang

4. Teknik pengumpulan data

Penelitian ini menggunakan metode pengumpulan data seperti wawancara, pengamatan, dan dokumentasi.

a. Observasi

Observasi, seperti yang dijelaskan oleh Bungin (2015), adalah metodologi pengumpulan data yang melibatkan pengawasan dan pencatatan informasi yang diperoleh melalui pengamatan dan persepsi langsung. Dalam bidang penelitian, observasi memerlukan pemeriksaan sistematis dan dokumentasi data yang berkaitan dengan konteks penelitian. Dalam penelitian ini, pengamatan dilakukan untuk menilai implementasi inisiatif bantuan makanan non-moneter (BPNT), dengan peneliti mengasumsikan peran pengamat netral semata-mata berfokus pada pengumpulan data yang komprehensif, daripada terlibat aktif sebagai peserta dalam subjek penelitian. Pengamatan dilakukan di Desa Baosan Lor, Kecamatan Ngrayun, Kecamatan Ponorogo.

b. Wawancara

Dalam penelitian ini, wawancara dilakukan tanpa kendala pertanyaan yang telah ditentukan, namun tetap diintegrasikan ke dalam kerangka penelitian. Pendekatan ini diterapkan untuk meningkatkan transparansi

proses wawancara (Sugiyono, 2015). Peneliti terlibat dalam wawancara terperinci dengan peserta untuk mengatasi masalah yang dihadapi. Yang diwawancarai antara lain kepala desa, pendamping program bantuan pangan non tunai, dan penerima bantuan pangan non tunai (BPNT) di Desa Baosan Lor, Kecamatan Ngrayun, Kabupaten Ponorogo..

c. Dokumentasi

Studi dokumentasi dilakukan untuk meningkatkan validitas dan data yang dikumpulkan di lapangan, memberikan pemahaman yang komprehensif tentang topik melalui materi tertulis. Dokumen didefinisikan sebagai dokumentasi tertulis yang berkaitan dengan kejadian sebelumnya, terlepas dari apakah itu dibuat khusus untuk tujuan penelitian atau tidak. (Ghony & Almanshur, 2012). strategi dokumentasi, khususnya mencari dan memperoleh informasi yang dibutuhkan dari sumber yang sudah tertulis. Dokumen sering kali dapat digunakan sebagai sumber data untuk pengujian, penafsiran, dan bahkan prediksi. Dokumen sangat penting bagi sebuah penelitian karena, dengan analisis yang cermat, dokumen dapat memberikan pengetahuan kepada peneliti.

5. Teknik Analisis Data

Proses pengumpulan dan pengaturan informasi yang dikumpulkan secara sistematis dari pengamatan, wawancara, dan dokumentasi dikenal sebagai analisis data. Pendekatan ini melibatkan mengklasifikasikan dan menjelaskan data, menggabungkan data, menyusun data, mengenali elemen dan area penting untuk eksplorasi lebih lanjut, dan mengembangkan kesimpulan yang dapat dipahami oleh diri sendiri dan orang lain. Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan model interaksi yang menggabungkan tiga aliran aktivitas simultan setelah fase pengumpulan data: pengurangan data, presentasi data, dan verifikasi gambar/kesimpulan. (Sugiyono, 2017)

Miles dan Huberman mengusulkan kerangka kerja untuk analisis data kualitatif yang mencakup langkah-langkah berurutan dari reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan (Miles et al., 2014).

a) Pengumpulan Data

Menganalisis dan memformat data untuk pemeriksaan merupakan tahap penting dalam penelitian. Proses ini melibatkan tugas-tugas seperti transkripsi wawancara, digitalisasi dokumen, input observasi lapangan, dan pengkategorian informasi berdasarkan asal-usulnya.

b) Reduksi data

Pengurangan data adalah teknik yang digunakan dalam analisis untuk mengklasifikasikan, memandu, menghilangkan data yang berlebihan, dan mengatur data dengan cara yang lebih abstrak untuk menggambarkan penggambaran yang lebih jelas dari hasil pengamatan dalam pengaturan logis.

c) Penyajian Data

Penyajian data melibatkan pemeriksaan data melalui berbagai format seperti matriks, jaringan, diagram, atau grafik. Dalam domain penelitian kualitatif, data biasanya disajikan melalui narasi ringkas, tabel, bagan, dan analisis koneksi di antara berbagai kategori.

d) Penarikan Kesimpulan

Kesimpulan adalah deduksi yang telah dibuat dan divalidasi. Deduksi awal yang diajukan bersifat sementara dan dapat direvisi jika tidak ada bukti kuat untuk mendukung fase pengumpulan data berikutnya. Kesimpulan dalam studi kualitatif memiliki kapasitas untuk mengatasi pernyataan masalah yang dikembangkan di awal

